

**PANDANGAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH
MENGENAI KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
RAPBN 2018**

*Disampaikan Oleh Juru Bicara FPKB DPR-RI :
H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag
Anggota Nomor: A-44*

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua,***

**Yang Terhormat, Saudara Pimpinan Sidang
Yang Terhormat, Saudara Anggota Dewan
Yang Terhormat, Saudara Menteri Keuangan RI
Serta Hadirin yang berbahagia**

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka mendengarkan penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2018.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*.

Selanjutnya, perkenankanlah kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Tahun 1438 Hijriah / Tahun 2017 M bagi seluruh umat muslim, marilah kita sambut bulan suci ramadhan yang penuh ampunan ini dengan suasana bersih lahir bathin, semoga ibadah di bulan suci ramadhan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk menyampaikan Pandangan Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2018 ini.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Pelaksanaan kebijakan fiskal Tahun 2018 nanti merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dimana masih akan banyak mengalami tantangan dan kendala yang cukup berat, baik yang berasal dari eksternal maupun internal seperti dalam pelaksanaan APBN Tahun 2015 sampai 2017 sekarang. Namun demikian, FPKB memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2018 harus mewujudkan kemaslahatan yang riil bagi rakyat, meskipun dalam kondisi sesulit apapun yang dihadapi, hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam perspektif ilmu politik (*al-fiqh as-siyasiy*) bahwa upaya untuk mewujudkan kemaslahatan itu hukumnya wajib dilakukan oleh pemerintah, seperti terefleksi dalam kaidah fiqh “*maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib*”.

Secara umum, FPKB melihat dan memprediksi bahwa perkembangan perekonomian nasional pada 2018 dapat lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, perekonomian global terlihat mulai menunjukkan sejumlah perbaikan, berdasarkan proyeksi dari International Monetary Fund (IMF) dalam *World Economic Outlook* mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi global di 2018 sebesar 3,6 persen atau sedikit lebih tinggi dari proyeksi tahun 2017 sebesar 3,5 persen. Di sisi lain, perekonomian domestik pada 2018 juga diyakini semakin baik dan lebih stabil jika dibandingkan tahun sebelumnya. FPKB berpandangan bahwa dengan membaiknya trend kondisi ekonomi global maupun domestik di tahun 2018 nanti, maka optimalisasi pelaksanaan kebijakan **fiskal ekspansif** oleh pemerintah harus memberikan hasil yang positif dan disertai indikator-indikator capaian yang terukur dan berdimensi luas dalam rangka mengakselerasi pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan tujuan semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah telah menyampaikan keterangan mengenai Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 pada Sidang Paripurna 19 Mei 2017 lalu. Berkaitan dengan itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk memberikan beberapa catatan penting sebagai latar belakang sikap dan pondasi politik anggaran FPKB pada tahun fiskal 2018 nanti. Catatan penting FPKB yang perlu ditanggapi serius oleh Pemerintah antara lain:

1. Mengenai Proyeksi Variabel Ekonomi Makro 2017 yang telah disampaikan Pemerintah terdiri dari: 1) Proyeksi pertumbuhan ekonomi di rentang 5,4-6,1 persen; 2) Target inflasi berada di kisaran 2,5-4,5 persen (year on year); 3) Rata-rata nilai tukar diperkirakan berada antara Rp13.500 - Rp13.800; 4) Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan 4,8-5,6 persen; 5) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 45-60 USD/barrel serta 6) Target lifting minyak bumi 771-815 ribu barrel/hari dan target lifting gas bumi 1.194-1.235 ribu barrel/hari.

Secara umum FPKB mengapresiasi semangat Pemerintah untuk mendongkrak perekonomian di 2018. Meski demikian, dengan melihat proyeksi variabel-variabel makro tersebut FPKB menilai bahwa pemerintah sudah tidak dapat lagi memenuhi janji capaian target RPJMN 2015-2019 yang ditentukan Pemerintah sendiri. Selain itu, rentang angka proyeksi yang diberikan pemerintah juga masih sangat moderat dan belum berani untuk menentukan rentang angka yang lebih sempit dan presisi dalam memprediksi kondisi ekonomi Indonesia di 2018. Sungguh pun demikian, tentunya proyeksi ini akan dibahas lebih lanjut antara Pemerintah dan DPR untuk menentukan angka target yang lebih realistis dan kredibel.

2. Lebih lanjut, secara khusus perkenankan kami, FPKB, untuk mengulas satu per satu variabel makro yang menjadi komponen penting dalam penentuan postur APBN 2018 nantinya.

i. **Pertumbuhan Ekonomi.** FPKB berpendapat bahwa pemerintah masih saja memberikan proyeksi yang terlalu tinggi (*over estimate*) bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Seperti diketahui bersama kondisi ekonomi Indonesia masih mengalami permasalahan struktural. Jika dilihat struktur pertumbuhan ekonomi, maka dapat dilihat laju pertumbuhan sektor pertanian dan industri yang menjadi penyumbang terbesar PDB nasional semakin melambat. Sebaliknya, sektor-sektor jasa semakin diandalkan untuk memacu pertumbuhan. Di sisi lain jika dilihat berdasarkan komponen pengeluaran, maka tidak dapat lepas dari kontribusi konsumsi rumah tangga yang sangat sensitif dengan daya beli dan trend nya dalam beberapa periode terakhir mengalami penurunan. **Keinginan pemerintah untuk mendorong investasi melalui sejumlah paket pun terlihat belum begitu optimal, bahkan nilai ICOR di 2016 sebesar 6,46 masih terlihat tinggi. Kondisi itu menunjukkan bahwa efisiensi produksi dari investasi yang masuk masih sangat rendah. Dengan sejumlah kompleksitas yang masih dihadapi, FPKB memandang bahwa target pertumbuhan ekonomi di 2018 sekitar 5,3-5,4 persen.**

ii. **Inflasi.** Sebagai salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap tingkat daya beli dan konsumsi masyarakat, sudah sepatutnya Pemerintah bersama Bank Indonesia dari pusat hingga ke daerah untuk menjaga stabilitas laju inflasi. **FPKB berpendapat bahwa memang inflasi dalam dua tahun terakhir dapat ditekan dibawah 4 persen, namun seiring dengan laju pertumbuhan yang semakin meningkat niscaya laju inflasi akan ikut terkerek. Dengan begitu, asumsi batas bawah inflasi umum sebesar 2,5 persen sangat sulit diwujudkan.** FPKB memandang bahwa laju inflasi di 2018 akan mengalami peningkatan hingga mencapai kisaran 4-4,5 persen (yoy). Hal itu dikarenakan adanya potensi peningkatan

inflasi dari sisi harga diatur pemerintah (*administered prices*) akibat sejumlah penghapusan subsidi listrik bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah dan beberapa komponen inti (*core inflation*). Disamping itu juga, inflasi harga pangan (*volatile food*) masih harus terus diwaspadai selama kedaulatan pangan belum terpenuhi.

- iii. **Nilai Tukar Rupiah.** Dapat dipahami bersama bahwa dengan rezim devisa bebas dan sistem nilai tukar mengambang (**floating rate**), maka pengelolaan nilai tukar Rupiah tidak mudah dan semakin menantang. Semakin terintegrasinya pasar keuangan global dan berbagai instrument keuangan ditambah dengan situasi global yang masih diliputi ketidakpastian membuat permasalahan nilai tukar tambah rumit dan kompleks. **FPKB berpendapat bahwa proyeksi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar di 2018** selain dipengaruhi kondisi eksternal tersebut **juga bergantung pada kekuatan fundamental dan pendalaman pasar keuangan di dalam negeri.** Dengan demikian, **nilai tukar Rupiah diharapkan tidak hanya menguat di level Rp 13.500 tetapi volatilitasnya juga dapat terjaga.**
- iv. **Suku Bunga SPN 3 bulan.** Di tengah gencarnya pemerintah menambah utang, tentu asumsi suku bunga SPN 3 bulan menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar tidak menambah beban APBN dalam jangka menengah panjang. **Data menunjukkan bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan perpajakan semakin meningkat hingga mencapai 13 persen di 2016.** Dengan kondisi penerimaan perpajakan yang masih lesu, biaya utang yang ditanggung harus dimitigasi dengan cermat. **FPKB berpendapat rata-rata suku bunga SPN 3 bulan dapat ditekan pada level 5 persen.**
- v. **Harga Minyak Mentah.** Sebagaimana diketahui bahwa harga minyak mentah dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Namun demikian **perlu diperhatikan bahwa trend harga minyak mentah sepanjang 2016 hingga saat ini mengalami kenaikan.** Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang mulai membaik diiringi dengan produksi yang relative stabil dari negara OPEC maupun non-OPEC telah mendongkrak harga minyak mentah dunia dan **FPKB memandang bahwa harga ICP di 2018 berada pada kisaran harga 55-60 USD per barel.** Kondisi ini tentu harus diwaspadai oleh pemerintah, mengingat subsidi BBM saat ini sudah dicabut dan mengikuti harga pasar sehingga akan berpengaruh terhadap daya beli rakyat kecil.
- vi. **Lifting Minyak dan Gas Bumi.** **FPKB berpendapat bahwa tren penurunan realisasi lifting minyak dan gas bumi yang terjadi belakangan ini harus diputus oleh Pemerintah.** Langkah untuk mendorong kinerja KKKS serta peningkatan kegiatan eksplorasi, dan pembangunan kilang-kilang baru harus sudah terlihat hasilnya di 2018. **FPKB mendorong agar target batas atas yang ditetapkan pemerintah yaitu**

lifting minyak bumi sebanyak 815 ribu barel minyak per hari dan lifting gas bumi sebanyak 1.235 ribu barel setara minyak per hari harus dicapai oleh Pemerintah.

3. Disamping berbagai variabel ekonomi makro tersebut, variabel kesejahteraan juga sangat perlu diperhatikan. Sebagai indikator pembangunan berkelanjutan dan turunan dari sila ke 5 Pancasila ini tentu harusnya menjadi agenda utama pemerintah dalam merancang pokok-pokok kebijakan fiskal. Variabel kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan IPM yang menjadi proxy kesejahteraan bahkan belum dihitung sensitivitas perubahannya terhadap resiko fiskal. Pada tataran itu, FPKB berpendapat bahwa:

- i. Pemerintah harus lebih realistis dalam menentukan target penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengingat target 5,1-5,4 persen di 2018 masih sulit untuk dicapai. Realisasi angka TPT seringkali meleset dari target pada APBN. Kondisi ini dipicu oleh semakin rendahnya elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Stagnasi TPT ini tentu tidak lepas dari turunnya performa industri pengolahan yang banyak menyerap tenaga kerja serta belum optimalnya serangkaian paket kebijakan ekonomi yang digadang dapat menciptakan banyak lapangan kerja sektor formal.**
- ii. Sama halnya dengan target penurunan TPT, ambisi pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 9,0-10,0 persen di 2018 juga dipandang belum realistis mengingat dalam beberapa tahun terakhir realisasinya jauh dari target APBN. Hal itu diakibatkan elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan semakin rendah yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum berkualitas. Selain itu, masih banyaknya penduduk rentan miskin yang mencapai 30 persen tentu dapat memberi tekanan pada target kemiskinan yang ingin dicapai pemerintah**
- iii. Selanjutnya, variabel yang perlu menjadi perhatian utama pemerintah yaitu ketimpangan dengan diukur melalui rasio Gini ditarget menjadi 0,38 di 2018. Perlu disadari bahwa rasio Gini Indonesia pada 2016 memang menurun. Namun kondisi itu lebih disebabkan adanya perbaikan konsumsi pada kelompok 40 persen penduduk berpengeluaran menengah, dan turunnya kontribusi 20 persen penduduk dengan pengeluaran tinggi. Sedangkan 40 persen penduduk berpengeluaran rendah kondisinya masih stagnan dan cenderung belum ada perbaikan. Selain itu, metode penghitungan rasio Gini yang menggunakan data pengeluaran penduduk bisa saja bias terhadap kondisi pendapatan riil di masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah diharap tidak berpuas diri dengan capaian rasio Gini yang saat ini menurun.**

- iv. Terakhir, **target IPM sebesar 71,38 tentu lebih realistis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.** Namun untuk mendongkrak IPM tersebut tentu **Pemerintah harus fokus dengan kebijakan Pendidikan dan Kesehatan yang konsisten dan menjangkau seluruh lapisan rakyat.**
4. Mengenai Kebijakan **Pendapatan Negara** tahun 2018 yang diperkirakan mencapai sekitar 12,9 - 14,1 persen dari PDB, maka FPKB berpendapat diperlukannya upaya *extra effort* oleh pemerintah untuk dapat mencapainya. Secara umum pendapatan negara tahun 2018 masih akan didominasi oleh penerimaan dalam negeri, khususnya di sektor perpajakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Paska pelaksanaan program *tax amnesty*, diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap terciptanya perluasan basis data perpajakan yang dapat berdampak peningkatan *tax ratio* yang selama beberapa tahun ini cenderung stagnan, bahkan di tahun 2018 hanya dipatok berkisar 11,0-12,0 persen atau sangat jauh dibanding dengan negara-negara tetangga di ASEAN, untuk itu FPKB mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan *tax ratio* menjadi sekitar 13,0-14,0 persen.

Disamping perpajakan, FPKB juga meminta pemerintah di tahun 2018 untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Negara di bidang **kepabeanan dan cukai** melalui inovasi-inovasi kebijakan. Dalam hal ini, FPKB mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai dengan melakukan perluasan obyek kena bea dan cukai terkait komoditas yang berpotensi merusak lingkungan.

Terkait dengan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** baik yang berasal dari Penerimaan SDA Migas maupun Non-Migas, Dividen BUMN, maupun PNBP lainnya, FPKB menilai peluang untuk ditingkatkan masih sangat terbuka. Secara khusus untuk peningkatan PNBP SDA migas tahun 2018, FPKB mendukung rencana pemerintah untuk melakukan perubahan *PSC cost recovery* menjadi *PSC Gross Split*, apalagi beberapa tahun terakhir ini angka *ratio cost recovery* selalu lebih tinggi terhadap *gross revenue*. Selain itu, FPKB juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan PNBP perikanan, mengingat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar, namun sumbangannya terhadap PNBP masih sangat minim.

5. FPKB berpendapat bahwa **Kebijakan Belanja Negara** di tahun 2018 yang diperkirakan sebesar 15,1 - 16,0 persen dari PDB harus dapat menciptakan kemaslahatan warga negara dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan, sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah fikih yang dipegang teguh oleh FPKB yang berbunyi "***tasharruful imam 'alal ro'iyah manuutun bil mashlahah***", (kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan bersama). Untuk itu, FPKB **secara tegas mendesak Pemerintah** agar dapat memenuhi target pembangunan yang hendak dicapai sebagaimana yang tertuang

dalam dokumen KEM dan PPKF tahun 2018 yaitu pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-6,1 persen, menurunkan tingkat pengangguran pada kisaran 5,3-5,5 persen, menurunkan tingkat kemiskinan antara 9,0-10,0 persen serta pengurangan gini rasio sebesar 0,38 persen.

FPKB berpendapat bahwa peningkatan kualitas tata kelola Belanja Negara baik berupa **kebijakan Belanja Pemerintah Pusat** yaitu **belanja K/L** maupun **belanja Non K/L** apabila pemerintah konsisten meningkatkan alokasi belanja negara untuk pembangunan sektor unggulan yang mendorong terciptanya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri secara optimal, mengingat sektor-sektor tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Terkait pemanfaatan alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, FPKB meminta pemerintah untuk memperhatikan alokasi anggaran pendidikan khusus untuk madrasah dan pesantren di Indonesia agar dapat meningkatkan daya saing SDM dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Secara khusus, FPKB mengapresiasi dan mendukung kebijakan belanja negara untuk pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antar kelas pendapatan dan antar wilayah yang menjadi ***affirmative policy*** pemerintah bagi daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, dan Kawasan Timur. Selanjutnya, untuk **kebijakan subsidi**, FPKB berpendapat bahwa alokasi anggaran subsidi, baik subsidi energi maupun subsidi non energi harus dikelola secara efisien dan diarahkan lebih tepat sasaran guna memperbaiki kualitas belanja negara.

Mengenai alokasi anggaran **Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa**, FPKB berpendapat bahwa Pemerintah dalam menyalurkan Belanja transfer ke daerah berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY harus berlandaskan perencanaan yang baik dan dibarengi dengan peningkatan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dan sesuai dengan fungsinya. FPKB secara khusus memandang bahwa rencana penerapan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang bersifat tidak final mengikuti dinamika PDN Neto dapat meningkatkan kualitas belanja negara. Selanjutnya, FPKB meminta agar peningkatan anggaran **Dana Desa** yang dalam APBN tahun 2018 yang ditargetkan mencapai 10 persen dari dan diluar anggaran Transfer ke Daerah sesuai amanah UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa harus dikelola secara akuntabel sehingga bisa mengurangi kesenjangan antara desa-kota, mendorong kemandirian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

6. FPKB memandang bahwa **Kebijakan Pembiayaan Anggaran** untuk membiayai Defisit Anggaran pada tahun 2018 yang diperkirakan berkisar 1,9 - 2,3 persen dari PDB merupakan konsekuensi logis dari dipilihnya kebijakan fiskal ekspansif oleh pemerintah. FPKB secara khusus meminta

pemerintah terus memperhatikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrument pembiayaan anggaran secara *prudent* dengan memperhatikan volatilitas perkembangan pasar SBN dalam negeri dan mencermati akan resiko sewaktu-waktu terjadinya *sudden reversal* atau pembalikan dana asing secara tiba-tiba, mengingat hampir 40 persen telah dikuasai asing serta Indonesia sampai sekarang masih penganut rezim devisa bebas.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,

Demikianlah beberapa pandangan kami terhadap pembahasan terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2018 ini. Selanjutnya, dengan mengucapkan ***Bismillaahirrahmaanirrahiim***, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan **persetujuannya**, bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018 ini untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian saudara pimpinan dan para anggota, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridloannya. Amien.

***Wallahul Muwaffiq llaa Aqwamith Thorieq,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Jakarta, 30 Mei 2017

**PIMPINAN,
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI**



Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si
Ketua



H. Cucun A. Syamsurijal, S.Ag
Sekretaris